

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur mengenai pembangunan infrastruktur jalan telah tertuang dalam peraturan bupati tanjung jabung timur nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan jalan daerah. Dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang telah termuat dalam pasal 34 dan 35. Selain itu Berdasarkan surat keputusan (SK) yang telah disahkan bupati tanjung jabung timur tahun 2024 panjang ruas jalan kecamatan mendahara yaitu 146,81 Km (12,558%) dari total panjang ruas jalan kabupaten tanjung jabung timur 1167,396 Km. Pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara masih terus berlangsung. Berbagai proyek pembangunan jalan telah dilaksanakan dengan baik, termasuk perbaikan dan perluasan jalan utama serta akses ke daerah-daerah terpencil. Dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerapkan beberapa kebijakan yang relevan dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara dengan mengupayakan usulan pembangunan jalan menggunakan dana APBN, APBD, serta kerjasama dengan pihak swasta yang diusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG), Anggota dewan serta rencana kerja/usulan dinas PUPR. Dengan bentuk kebijakan

2. diantaranya: (1) perencanaan terpadu, (2) prioritas pembangunan, (3) pengawasan dan pengendalian mutu, (4) partisipasi masyarakat, (5) pemeliharaan berkelanjutan, (6) kolaborasi dengan pihak terkait.
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara sudah menunjukan hasil yang baik berdasarkan hasil analisis 4 dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari bentuk komunikasi yang dilakukan, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bahwa kejelasan informasi maupun komunikasi dalam pelaksanaan kebijakam pembangunan infrastruktur jalan telah terlaksana dengan baik kepada masyarakat maupaun pegawai yang bertugas. Dari dimensi sumber daya menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia sudah memenuhi dalam rangak pelaksanaan tugas dan pemenuhan tanggung jawab, sedangkan sumber daya finansial nya juga telah memadai mulai dari perencana hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Selanjutnya dari aspek disposisi menunjukan bahwa sikap para pelakasana kebijakan sudah cukup baik, Konsistensi dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara cukup baik dilihat dari ketaatan dan disiplin mereka dalam melaksanakan pelayanan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, akan tetapi ketanggapan atau respon pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi jika terjadi kerusakan jalan. Terakhir dari aspek struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan tersebut sudah terstruktur dan komprehensif, dapat dipastikan bahwa pembangunan

infrastruktur jalan di kecamatan mendahara telah dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta standar yang telah ditetapkan.

4.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Harus Memberi Anggaran Yg Lebih Besar Sesuai Ketentuan APBD, agar pembangunan infrastruktur jalan dapat segera terealisasi.
2. Pemerintah kabupaten tanjung jabung timur perlu melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, serta tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.